

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan saat ini sudah terdapat 7 (tujuh) lokasi pelabuhan antara lain Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Garongkong dan Pelabuhan Bima. Pemanfaatan aset terhadap pelabuhan tersebut meningkatkan PNBPN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mengurangi beban pemeliharaan dari APBN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2. Selain Kerja Sama Pemanfaatan, terdapat kerja sama pengoperasian dan pengembangan pelabuhan melalui skema Konsesi. Skema Konsesi tidak termasuk dalam Pemanfaatan Aset atau Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Konsesi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan dimana setelah masa konsesi berakhir seluruh aset investasi dari Badan Usaha Pelabuhan diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan menjadi Barang Milik Negara. Selain itu, konsesi memberikan kontribusi PNBPN yang cukup signifikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. Dalam rangka pengembangan pelabuhan maupun pemanfaatan aset di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB) belum

memiliki kesadaran terhadap aset yang dimiliki, sehingga pemanfaatan BMN hanya sebatas menunggu peminat yang datang, kemudian kendala pada proses KSP yang dimulai dari pengusulan kerja sama pemanfaatan oleh KPB sampai ditandatanganinya Perjanjian KSP BMN memakan waktu cukup lama, yakni 300 hari. Selain itu, masih banyak pelabuhan eksisting (yang sudah terbangun) belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang menyebabkan pengembangan pelabuhan menjadi terhambat karena acuan pengembangan pelabuhan menggunakan Rencana Induk Pelabuhan.

4. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan penggambaran kuadran perbandingan IFAS dan EFAS, pelaksanaan pengembangan pelabuhan melalui skema pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berada di kuadran antara Kekuatan dan Ancaman (Kuadran ST). Kuadran tersebut dapat diartikan pelaksanaan pendanaan pengembangan pelabuhan melalui skema pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunjukkan bahwa meskipun terdapat ancaman, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki kekuatan internal untuk menghadapi ancaman tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Hasil Analisis SWOT, antara lain:

1. Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KSP untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap perjanjian KSP dan standar kinerja untuk meningkatkan daya saing Pelabuhan;
2. Melakukan manajemen risiko terhadap risiko bencana alam yang mungkin terjadi;
3. Pendekatan persuasif kepada Masyarakat di sekitar Pelabuhan;

4. Membuat inovasi skema kerja sama untuk peningkatan/pengembangan peralatan bongkar muat agar ketergantungan terhadap APBN berkurang dan daya saing pelabuhan tetap kompetitif;
5. Memberikan kebijakan insentif dan dispensasi maupun penjaminan kargo untuk menghindari risiko ketidakstabilan ekonomi yang mungkin terjadi; dan
6. Lebih hati-hati dalam menyusun RIP untuk mengakomodir dampak sosial dan lingkungan serta memitigasi risiko bencana alam.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design* (3rd ed.). SAGE Publication Ltd.
- Djasriain, E. A., Prawiranegara, M., & Kusumawati, D. (2022). *Hukum dan Administrasi Perencanaan* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Ekowanti, M.R.L., & Tamrin, M.H. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. UD Mentari.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (Efitra, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hariyadi, Panglima, J. P., Sari, R., Surya, T. A., Izzaty, Budiyanti, E., Hermawan, I., Sudarwati, Y., & Rusastra, W. I. (2020). *Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan*. www.obor.or.id
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (1st ed.). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Kusumastuti, D., & Sugiyama, S. A. G. E. (2017). *Manajemen Logistik Organisasi Publik* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press.
- Rangkuti, F. (2011). *SWOT – Balanced Scorecard: Teknik Menyusun Strategi Korporat Yang Efektif Plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko*. PT. Gramdeci Pustaka Utama.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). Penerbit KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com
- Sharon, G., Simamora, S., & Wijoyo, S. (2024) *Konsesi Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional*. Penerbit Deepublish.
- Triatmodjo, B. (2009). *Perencanaan Pelabuhan*. Beta Offset Yogyakarta.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2009). *Accounting, 23e*. South-Western Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Financial Accounting: IFRS, 3rd Edition* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

## B. Artikel Jurnal

- Abdullah, M. T. (2020). Model Public Private Partnership Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 102. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.102-114.2020>
- Aldinovitra. (2022). *Analisis Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur Publik di Daerah Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha*.
- Dinata, M. P. (2021). *Jangan biarkan Ada Aset Idle dan Tidak Terawat*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-berita/26523/Jangan-biarkan-Ada-Aset-Idle-dan-Tidak-Terawat.html>
- Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1).
- Halawa, E. (2021). Analisis SWOT sebagai Dasar Perumusan Strategi Pemasaran Berdaya Saing (Studi Kasus pada Dasom Beauty & Me Nail Surabaya). *Benchmark*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.46821/benchmark.v1i2.143>
- Kamil, M., Idrus, M., & Dewa, S. (2019). Model Pengaruh Dwelling Time terhadap Biaya Logistik di Terminal Petikemas Makassar. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 22(1), 89–94. <https://doi.org/10.25042/jpe.052018.15>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Skema KPBU*. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu>
- Kusumastuti, L. K. W. (2014, November 1). *Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia*. <https://www.itb.ac.id/news/read/4550>.
- Lembaga National Single Window. (2024, July 14). *Dashboard Dwelling Time*. [https://apps3.insw.go.id/dashboard\\_dtinsw.php](https://apps3.insw.go.id/dashboard_dtinsw.php)
- Mahmudi. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 9, 53–67.
- Malihah, L. (2023, July 31). *Profit Oriented adalah: Struktur, Jenis, Ciri, dan Perbedaannya*. <https://www.bee.id/blog/profit-oriented-adalah/>
- Milala, S. Z. (2023). *Strategi Pemanfaatan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara*.
- Narindra, R. A. A., Musadieg, M. Al, & Supriono, S. (2016) Analisis Pengaruh Dwelling Time Terhadap Pendapatan (Studi Pada PT. Terminal

- Petikemas Semarang Tahun 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 41(1), 51-56.
- Nugroho, A. A. (2018). *Paradigma Administrasi Publik: Bunga Rampai Perjalanan Keilmuan dari Public Administration sampai ke Public Governance*.
- Priadi, G. (2016). *Penerapan Konsep Public Private Partnership (PPP) Dan Konsep New Public Management (NPM) Dalam Meningkatkan Pemanfaatan Aset Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html>
- Purnama, A. W. (2022). Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Logistik Dan Transportasi*, 8(1), 1–12.
- Riyanto, Wibowo, R. A. J. S. H., Transelasi, F., & Sari, D. K. (2021). Dwelling Time pada Sistem dan Prosedur Penanganan Peti Kemas dengan Aplikasi Cost Terminal Operation System di Terminal Peti Kemas Semarang. *Dinamika Bahari*, 2(1), 49–55.
- Rusmiyanto D., & Dessixson, W.T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Universal Technic*, 1(1), 67-86. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v1i1.12989>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015, August 11). *Dwelling Time Dan Daya Saing Ekonomi*. <https://setkab.go.id/dwelling-time-dan-daya-saing-ekonomi/>
- Suparto, J. D., & Fahmi, E. (2024). Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan: Kajian Terhadap Mekanisme Developer's Contribution di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v8i1.23105>
- C. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. (2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. (2015).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. (2020).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. (2020).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan. (2021).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri. (2021).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. (2022).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. (2017).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (2021).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara. (2024).

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. (2022).

#### D. Dokumen-Dokumen Lainnya

Bahan Paparan Konsesi Dan Kerjasama Bentuk Lainnya. (2024).

Bahan Paparan Progress KPBU Kepelabuhanan. (2024).

Bahan Paparan Simplifikasi dan Standarisasi Proses KSP di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. (2024).

Creative Financing For Transportation Infrastructure Provision. (2024).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA 2017 (Audited). (2017).

Pengembangan Model Pelaksanaan Dan Penyaluran Dana Pendanaan Luar Negeri Bilateral. (2020). [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Skema\\_Model\\_Implementasi\\_dan\\_Penyaluran\\_Pendanaan\\_Luar\\_Negeri\\_Bilateral.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Skema_Model_Implementasi_dan_Penyaluran_Pendanaan_Luar_Negeri_Bilateral.pdf)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aset Tetap. (2011).



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A